

API DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KELOLA EKOSISTEM SABANA di Merauke, Papua Selatan

ARTIKEL LAINNYA

KUNJUNGAN DELEGASI BMZ ke SMK Kehutanan Negeri Makassar

FORCLIME LANJUTKAN PROGRAM MAGANG Tahun 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PAPUA BARAT DAYA susun rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 10 KAWASAN KONSERVASI Lingkup BBKSDA Papua

FASILITATOR KAMPUNG DAMPINGI KELOMPOK TANI Kampung Yanggandur, susun AD/ART

Editorial

Artikel utama *Newsletter* FORCLIME edisi November 2023 tentang pengelolaan kebakaran secara tradisional di sabana oleh adat masyarakat di Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua Selatan. Masyarakat adat di lanskap sabana di seluruh dunia telah lama memahami bahwa kebakaran adalah proses ekologis yang mungkin terjadi secara alami _ berkontribusi terhadap kesehatan ekosistem dan mereka telah mengembangkan praktik pengelolaan yang melindungi penghidupan dan ekosistem mereka. Pembakaran terkendali, yang merupakan praktik umum dalam pengelolaan tradisional, tidak hanya mencegah perambahan spesies invasif (misalnya *Melaleuca*) namun juga menjaga lanskap sabana dan meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menciptakan tambal sulam area yang terbakar dan tidak terbakar. Melalui pengurangan bahan organik kering/ biomassa, risiko kebakaran hutan yang tidak terkendali juga dapat dikurangi. Integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan dan pencegahan kebakaran hutan, dapat membangun ekosistem yang lebih berketahanan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong masa depan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Alasannya adalah banyaknya kebakaran kecil di awal musim kemarau dapat mencegah kebakaran yang lebih besar dan tidak terkendali di akhir musim kemarau.



Oleh karena itu, masyarakat adat merupakan pemangku kepentingan penting dalam pengelolaan lahan yang mengendalikan kebakaran demi kesehatan ekosistem. Kolaborasi antara kelompok masyarakat adat dan lembaga penanggulangan kebakaran modern dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam edisi ini juga ditampilkan kegiatan FORCLIME di Tanah Papua, termasuk pendampingan penyusunan AD/ART Kelompok Tani Moruti Kampung Yanggandur, Papua Selatan; Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua; serta pertemuan untuk menyusun rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam edisi ini juga menampilkan kegiatan terkait dengan Program Magang FORCLIME, merupakan program yang sudah diinisiasi sejak tahun 2019, yang ditujukan untuk mendukung masa depan Tanah Papua yang hijau. Terkait dengan pelaksanaan program kerja sama bilateral Jerman dan Indonesia, Delegasi BMZ (Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) mengunjungi SMK Kehutanan di Makassar melihat secara langsung kerja sama FORCLIME dengan Balai Pelatihan LHK Makassar dalam pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia Timur.

Christopher Eichhorn
Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Api dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kelola Ekosistem Sabana di Merauke, Papua Selatan

Catatan Hasil Kunjungan Lapangan ke Sabana di Taman Nasional Wasur, Papua Selatan

Christopher Eichhorn, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari

RA Kushartati Budiningsih, M.Si., Peneliti Pusat Perilaku dan Ekonomi Sirkular, Badan Riset dan Inovasi Nasional

FORCLIME dan Pemerintah Indonesia berkolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan tata kelola hutan melalui dukungan lokal yang signifikan. Rencana kerja tahunan FORCLIME merangkum berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendukung penyelesaian rencana pengelolaan hutan, termasuk di wilayah konservasi prioritas di Papua. Tujuan utama pengelolaan hutan lindung adalah stabilisasi penutupan hutan, yang secara tidak langsung melindungi cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Taman Nasional Wasur (TN Wasur) terletak di bagian paling tenggara Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dengan luas 413.810 hektare, kawasan konservasi yang luas ini terdiri dari berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan bakau pesisir dan padang rumput luas yang tergenang musiman, rawa alang-alang, sabana, hingga hutan musin (*monsoon forest*). Hutan-hutan tersebut berisi banyak situs spiritual dan arkeologi yang penting dan merupakan habitat bagi sejumlah spesies langka dan endemik, termasuk Fly River Grassbird (*Poodytes albolimbatus*) dan Munia Mahkota Abu-abu (*Lonchura nevermanni*). Oleh karena itu, lahan basah ini diakui sebagai lahan basah yang memiliki kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah yang Penting Secara Internasional.

Dalam lingkungan yang unik ini, masyarakat adat telah menggunakan metode khusus untuk pengelolaan sumber daya alam, ini merujuk pada cara yang juga diterapkan oleh masyarakat Aborigin di Australia bagian utara. Penggunaan api oleh masyarakat adat di Taman Nasional Wasur memiliki sejarah dan tradisi yang panjang. Masyarakat yang tinggal di area taman nasional mencoba mengimplementasikan praktik pembakaran terkendali di awal musim kemarau. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kebakaran hutan besar di akhir musim kemarau.

Praktik-praktik ini berlandaskan pada sebuah kalender kebakaran yang secara spesifik menentukan waktu optimal untuk melakukan pembakaran terkendali. Melalui konsep tersebut, pembakaran terkendali ini biasanya dilakukan secara kolektif oleh berbagai marga pada bulan Juni sampai Juli dalam skala yang kecil (maksimal mencapai 2-4 hektare), biasanya di sabana atau padang rumput di sekitar desa dan hutan sagu. Kelangsungan kegiatan ini sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan cara hidup mereka. Karena kurangnya dukungan dan pengakuan terhadap praktik-praktik ini, pengelolaan kebakaran sabana berbasis masyarakat telah mengalami perubahan ke arah praktik-praktik yang kurang terstruktur, yang terkadang menyebabkan kebakaran hutan berskala lebih besar di akhir musim kemarau dengan dampak buruk terhadap rumah, kebun, dan mata pencaharian masyarakat. Akibat dampak perubahan iklim dan berulangnya *El Niño-Southern Oscillation* (ENSO), bencana alam ini kemungkinan akan semakin sering terjadi di masa depan. Selain itu, masyarakat tradisional mengamati perubahan lamanya musim hujan dan musim kemarau, yang mereka kaitkan dengan dampak perubahan iklim.



Tim lapangan menganalisis pengetahuan dan praktik tradisional pengelolaan api di sabana di Taman Nasional Wasur, dan mereka memberikan rekomendasi tentang skema insentif yang potensial untuk penguatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam



Bentang alam di TN Wasur – Foto oleh Christopher Eichhorn

FORCLIME telah menginisiasi analisis terhadap pengetahuan tradisional dan praktik terkini dalam pengelolaan api di sabana di Taman Nasional Wasur, dengan tujuan mengidentifikasi skema insentif yang potensial. Hal ini juga mencakup analisis kondisi biofisik lanskap dan hubungannya dengan kebakaran serta emisi gas rumah kaca yang terkait. Antara tanggal 4-20 September, sebuah tim yang dibentuk oleh FORCLIME, yang melibatkan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, melaksanakan penilaian lapangan, diskusi kelompok terfokus dan lokakarya bersama berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan lokal. Tujuannya adalah menganalisis dan memahami praktik lokal, serta menciptakan pemahaman bersama tentang manfaat, risiko, dan tantangan pengelolaan api serta pengelolaan bersama dengan masyarakat lokal di TN Wasur.

Peran pengelolaan api di sabana di Taman Nasional Wasur

Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada musim kemarau pada bulan September hingga Desember setiap tahunnya. Kabupaten Merauke merupakan wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Rata-rata 35.000 ha terbakar pada tahun-tahun normal dan mencapai 130.000 ha pada tahun-tahun El Niño. Kebakaran tersebut disebabkan oleh aktivitas pembakaran yang sengaja dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang melintasi akses Jalan Trans Papua. Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap flora dan fauna di taman nasional, selain itu, juga berdampak buruk pada mata pencaharian masyarakat lokal, menghancurkan rumah, kebun, dan hutan sagu mereka. Tambahan pula, kebakaran merupakan sumber emisi karbon yang signifikan dan mempercepat perubahan iklim.

Tujuan dari kegiatan pembakaran ini sangat beragam dan dapat melibatkan praktik yang terkendali atau tidak terkendali oleh berbagai pihak. Penggunaan api yang tidak terkendali dan ceroboh

dapat menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat lokal seperti yang dijelaskan di atas. Namun, masyarakat adat di dalam taman nasional menggunakan kalender pembakaran musiman tradisional yang membatasi praktik ini pada awal musim kemarau (peralihan dari musim hujan ke musim kemarau) dan secara umum berdampak positif terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan kebakaran dengan intensitas rendah, yang hanya membakar lapisan vegetasi bagian bawah di wilayah kecil. Tujuan dari pembakaran tradisional awal musim kemarau ini adalah:



Pembuatan sekat bakar untuk melindungi dusun/bivak (tempat berlindung sementara di dalam hutan) atau sumber pangan (misalnya hutan sagu) dan kebun.



Perburuan: pembakaran yang dianjurkan digunakan untuk memicu regenerasi padang rumput guna menarik hewan pemakan rumput seperti rusa, walabi, dan tikus tanah. Hal ini juga digunakan untuk memfasilitasi akses ke lokasi penangkapan ikan.



Pengendalian rumput dan gulma (termasuk spesies invasif).

Meskipun praktik-praktik ini merupakan bagian dari adat istiadat setempat, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, terdapat indikasi bahwa praktik-praktik yang sebelumnya terstruktur telah berubah dari pengelolaan kebakaran tradisional menjadi praktik-praktik yang kurang terstruktur, sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan skala besar di akhir musim kemarau. Selain itu, peran masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan taman nasional melalui pengaturan pengelolaan bersama dengan otoritas taman nasional masih belum diformalkan.

Dalam mengevaluasi praktik pembakaran, ditemukan bahwa perubahan pola kebakaran ke awal musim kemarau atau peningkatan skala pembakaran tidak akan menghasilkan emisi GRK yang lebih rendah. Ini disebabkan oleh kondisi iklim Taman Nasional Wasur yang lembab sepanjang tahun. Praktik saat ini sejalan dengan kondisi biofisik sabana dan memiliki ruang untuk optimasi. Dalam komunitas lokal, tetua adat seringkali mencatat pergeseran relevansi pengetahuan dan peraturan lokal di kalangan generasi muda.

Ditemukan bahwa mendukung dan memperkuat pengetahuan dan praktik lokal dalam mengelola api di sabana sangatlah penting. Ini mencakup pengembangan kapasitas bagi masyarakat setempat dan staf Taman Nasional Wasur, misalnya dalam bidang GIS, ekologi dan pengelolaan api. Pengetahuan lokal dapat ditingkatkan dengan integrasi ke dalam kurikulum sekolah lokal serta melalui penerapan kembali 'rumah adat.' Dulunya, rumah adat adalah tempat dimana pengetahuan tradisional diajarkan dan praktik ini telah hampir hilang dalam beberapa tahun terakhir.

Revitalisasi lembaga-lembaga masyarakat tradisional adalah kunci untuk memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan kearifan lokal di luar ritual seremonial dan mengintegrasikannya ke dalam tatanan sosial. Selain itu, upaya ini berupaya membentengi penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adat, yang penghidupannya bergantung pada integritas sumber daya alam. Selain itu, koordinasi pembakaran yang terkendali dapat dioptimalkan antara otoritas taman nasional, pemadam kebakaran, dan kelompok pemadam kebakaran setempat (Masyarakat Peduli Api).

Pengelolaan api di sabana tetap menjadi kegiatan penting meski ada tantangan. Praktik ini tidak hanya melindungi mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga membantu menjaga produktivitas dan keanekaragaman hayati sabana. Ini dicapai melalui penciptaan pola area yang terbakar dan yang tidak terbakar, serta mencegah penyebaran semak dan belukar seperti *Melaleuca Spp.* Pembaruan

Masyarakat adat di dalam taman nasional memiliki pengetahuan tradisional tentang kalender pembakaran musiman, meski dalam praktiknya pembakaran dapat terjadi kapan saja, tidak terbatas pada awal musim kemarau

berkelanjutan ini membantu melestarikan lanskap budaya taman nasional dengan mendorong interaksi manusia-lingkungan. Dalam pertemuan terakhir di Balai Taman Nasional Wasur, hampir semua peserta menyetujui pentingnya api untuk sabana, asalkan dikelola secara tepat.

Tim FORCLIME mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Ir. Thomas Nifinluri, MSc., Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pak Arif Hasan, Kepala Seksi Wilayah II Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E).
- Bapak Yarman, S.Hut., M.P., Kepala Balai Taman Nasional Wasur.
- Bapak Aprianto, S.Si., M.Sc., Pengendali Ekosistem Hutan Muda, Balai Taman Nasional Wasur.
- Bapak Febrian Aditya Nugraha, S.Hut, Spesialis Perhutanan Sosial, Balai Taman Nasional Wasur.
- Bapak Danu Sri Hananto, S.Hut., Spesialis Perhutanan Sosial, Balai Taman Nasional.
- Bapak La Hisa, S.P., Spesialis Ekologi, Balai Taman Nasional Wasur.

atas dukungan yang diberikan terhadap kegiatan studi ini dan atas kepercayaan yang menjadi landasan kolaborasi kerja sama ini.

Revitalisasi kelembagaan masyarakat adat menjadi kunci penting dalam memfasilitasi transfer dan integrasi pengetahuan dan kearifan lokal, melebihi ruang lingkup ritual seremonial



Brigade kebakaran hutan TN Wasur—Foto oleh: Balai TN Wasur



Brigade kebakaran hutan TN Wasur—Foto oleh: Balai TN Wasur



Brigade kebakaran hutan TN Wasur — Foto oleh Balai TN Wasur



Pembakaran terkendali semak belukar tidak berdampak pada pohon di sekitarnya— Foto oleh Christopher Eichhorn

Kunjungan Delegasi BMZ ke SMK Kehutanan Negeri Makassar

FORCLIME 4.0 telah bekerja sama dengan Balai Pelatihan LHK Makassar dalam pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) di Indonesia Timur. Kerja sama juga dilakukan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar untuk pendidikan vokasi. Adanya kerja sama tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang diwujudkan melalui kunjungan ke SMK Kehutanan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2023. Kunjungan tersebut merupakan salah satu agenda dari Delegasi BMZ dalam lawatannya ke Indonesia mulai tanggal 21 hingga 27 Oktober 2023. Delegasi BMZ yang dipimpin oleh BMZ *Parliamentary State Secretary*, Ms Baerbel Kofler, diterima oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bapak Dida Migfar Ridha.

Dalam kunjungan tersebut, dibahas beberapa topik, termasuk: (1) Upaya pengembangan SDM LHK yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK) Makassar; (2) Upaya pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh SMK Kehutanan Negeri Makassar; (3) Isu strategis terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



Delegasi BMZ juga berdialog dengan para siswa dan mengunjungi fasilitas yang ada di SMK Kehutanan Negeri Makassar, termasuk laboratorium kultur jaringan, persemaian tanaman hutan, budidaya lebah, dan bank sampah.

Dalam kunjungan tersebut, Ms Kofler menyampaikan bahwa sangat terkesan dengan kunjungan ini dan berharap para siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa, bisa belajar secara intens untuk mengembangkan profesionalisme dalam melestarikan hutan di Indonesia.

Setelah mengunjungi Makassar, Delegasi BMZ melanjutkan lawatannya ke wilayah kerja GIZ di Cagar Biosfer Lore Lindu di Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Edy Marbyanto**, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

FORCLIME Lanjutkan Program Magang Tahun 2023 bagi Mahasiswa Asal Tanah Papua

FORCLIME memulai [program magang bagi mahasiswa di Tanah Papua pada tahun 2019](#), saat itu melibatkan 14 mahasiswa yang berasal dari Universitas Papua (UNIPA) dan Universitas Cenderawasih (UNCEN). FORCLIME kemudian melanjutkan program magang tersebut pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Hingga tahun 2022, total siswa yang telah mengikuti program ini berjumlah 40 orang.

Tahun ini FORCLIME menyelenggarakan program magang bagi tujuh mahasiswa dari empat universitas di Tanah Papua, yakni Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua dan Universitas Musamus.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta magang terlebih dahulu mengikuti lokakarya pengenalan (*introduction workshop*) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya terkait dengan penyelenggaraan program yang dilaksanakan GIZ, termasuk FORCLIME dan berbagai kegiatannya, isu-isu prioritas yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan dan berbagai isu lain yang mencakup SDGs dan pengarusutamaan gender. Lokakarya pengenalan dilakukan secara hybrid dan diadakan selama lima jam sehari dari tanggal 12 – 18 Oktober 2023. Setelah lokakarya, para peserta magang akan ditempatkan dan dilibatkan dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung dan akan diberi tugas khusus yang



mencakup kegiatan lapangan yang berhubungan dengan inventarisasi hutan, survei sosial ekonomi dan berbagai kegiatan penyuluhan. Melalui kegiatan ini para peserta magang diharapkan mendapatkan pengalaman praktis bekerja di sektor kehutanan. Sebagai tugas akhir, peserta magang akan mempresentasikan hasil magangnya sebagai bagian dari laporan magangnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Anna Manyakori**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Nita Yohana**, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat.
3. **Edy Marbyanto**, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Papua Barat Daya susun rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial



Dalam upaya percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, Pemprov Papua Barat Daya telah mem-bentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) pada bulan Juni lalu. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan [pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan rencana aksi dan rencana strategis](#). Untuk menyusun rencana kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian (Dinas LHKP) mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja yang akan menjadi panduan bagi Pokja PPS menentukan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana Pemprov dalam mendukung pelaksanaan program nasional Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, Dinas LHKP mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Sorong, Papua Barat Daya. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Per-tanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., dan dihadiri oleh ang-gota Pokja PPS serta mitra pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk FORCLIME.

Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk:

- Rencana kerja yang disusun untuk periode satu tahun.
- Fokus kegiatan mengacu pada empat unit kerja sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat Daya ten-tang Pokja PPS, yaitu: Percepatan akses perhutanan sosial; Pengembangan usaha dan kemitraan; Pendampingan; Advokasi, komunikasi, Monitoring dan pelaporan.

Draft rencana kerja yang disusun ini akan dipresentasikan pada Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Ok-tober 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Penilaian Efektivitas Pengelolaan 10 Kawasan Konservasi Lingkup BBKSDA Papua

Dalam mengelola kawasan konservasi, penilaian efektivitas pengelolaan merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi prioritas dan alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Papua. BBKSDA Papua mengelola 19 kawasan konservasi dengan luas sekitar 4.132.502,71 hektare yang tersebar di 24 kabupaten/kota di empat provisi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayahnya, BBKSDA Papua mengadakan penilaian atas 10 kawasan konservasi di bawah administrasinya pada tanggal 14-15 September 2023 di Jayapura, Papua. Sementara pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap sembilan kawasan konservasi lainnya telah dilakukan pada akhir tahun lalu.

Kegiatan penilaian 10 kawasan konservasi tersebut dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Papua, A.G. Martana, S.Hut., MH., dan dihadiri oleh 60 peserta yang mewakili para pihak terkait. Sementara Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Jefri Susyafrianto memberikan arahan secara daring.



Untuk melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menetapkan Management Effectiveness Tracking Tool (METT) yang merupakan metoda pendekatan yang diterima secara internasional, untuk memantau dan menilai keseluruhan pengelolaan kawasan konservasi. METT dapat membantu pihak pengelola kawasan konservasi untuk menilai seberapa efektif kawasan konservasi dikelola, dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan/ atau meningkatkan kondisi yang ada. Dari penilaian tersebut akan memberikan rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
2. Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Tanah Papua

Fasilitator Kampung Dampingi Kelompok Tani Moruti Kampung Yanggandur, Papua Selatan susun AD/ART

Mengacu pada peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020, dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) merupakan salah satu persyaratan penting dalam penilaian kelembagaan kelompok tani hutan. AD/ART merupakan perangkat aturan yang harus dimiliki sebagai pedoman untuk menjalankan organisasi. Dokumen tersebut merupakan peta navigasi yang mengarahkan jalan bagi organisasi kelompok tani hutan. Adanya dokumen ini menegaskan bahwa suatu kelompok tani hutan telah memiliki kelengkapan organisasi.

Oleh karenanya, setelah melakukan identifikasi atas kelompok tani Maroti di Kampung Yanggandur, salah satu kampung dukungan Taman Nasional Wasur dan FORCLIME di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Theodorus Tethool S.Sos., fasilitator pelaksanaan

kegiatan di kampung tersebut, mendampingi proses penyusunan AD/ART kelompok tani Maroti pada tanggal 12 – 13 September 2023 di Kampung Yanggandur.

Dari proses pendampingan ini, diharapkan akan lahir panduan yang membangun, memberdayakan, dan memacu ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. KTH Moruti adalah kelompok tani baru yang masih belum mencapai Kelas Pemula. AD/ART yang sedang disusun nantinya akan menjadi panduan bagi mereka, selain itu, menjadi pendorong untuk peningkatan kelas kelompok tani tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Theodorus Tethool**, Fasilitator Kampung Yanggandur
2. **Ruben Yogi**, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
3. **Rut Ohoiwutun**, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat

